

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A'an Efendi dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Jakarta.

Abdul Qodir Djaelani. (2014). "Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Penangkapan ikan ilegal dalam Membangun Poros Maritim Indonesia" dalam *Supremasi Hukum*. 3 (1): hlm 168-192.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta

Almuzzamil, T. Muhammad. (2017). "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Penangkapan ikan ilegal pada Tahun 2014-2015" dalam *Jom Fisip*.

Ali Sunan, W. B. (2014). *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. Jakarta: Ref Graphika.

Arikunto, S. (2002). "Metodelogi Penelitian". Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Bahari, Mina. (2019). "Komitmen Serious Pemerintah Perangi Penangkapan ikan ilegal. Pusat Data Statistik dan Informasi (PUSDATIN) Sekretariat Jendral Kementrian Kelautan dan Perikanan". hlm 64

Djohan Tunggal, Arif. 2014, *Aspek-Aspek Hukum Laut Pendekatan Tanya Jawab*, Harvarindo, Jakarta, hlm. 65.

Halimatul Maryani, dkk. 2022. *Peran Hukum Internasional Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penangkapan ikan ilegal Di Perairan Indonesia*. Editor Abdul Halim. Tim Pustaka Prima.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung



- Jonaedi Efendi dan johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Prenada Media. Depok
- LAN RI. 2008. Sistem Administrasi Negara RI (SANRI). Haji Masagung.
- Nunung Mahmudah, 2015. "Penangkapan ikan ilegal" Pertanggung Jawaban Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia. Sinar Grafika. Penerbit Bumi Aksara.
- Parthiana, I Wayan. 2014. Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia. Bandung: Yrama Widya.
- Rahmawati Sururama. 2020. Pengawasan Pemerintah. Cendekia Press. Bandung
- Saiful Anwar. 2004. Sendi-Sendi Hukum Adminitrasi Negara. Glora Madani Press. Jakarta.
- Suriansyah Murhaini. 2008. Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah. Laksbang Mediatama. Yogyakarta.
- Yusuf Solichien. M, 2021 Peran Negara Dalam Memberantas Penangkapan ikan ilegal. Penerbit Kata Hasta.
- Winarwati, Indien. 2016. Hukum Internasional. Malang: Setara Press.

JURNAL

- Arini Nur Annisa (dkk), Government Supervision Of The Lights Fulfillment Of Housed Workers In The Transition Period, A Long Law Review, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm.262
- Abdul Rahman, 2016. *Dampak Penangkapan ikan ilegal Terhadap Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Liukang Tangaya Kabupaten Pangkep*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chayaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 2



- Zakariya, 2020. *Pemberdayaan Nelayan Dalam Membangun kekuatan Ekonomi Melalui Pengolahan Ikan Di Desa Karangagung*. nal IMEJ. Islamic Management And Empowerment Journal. lume 2 Nomor 2, Desember 2020.

- o Oktaviardy, 2023. *Penangkapan Ikan Secara Ilegal Di Wilayah*

Laut Indonesia Sebagai Kejahatan Terhadap Kedaulatan Negara.
nsrat. LEx Privatium Vol. XI/N0. 4/Mei/2023.

Garda Yustisia Pambudi, dkk, 2021. *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Fishing di Indonesia.* Jurnal Gema Keadilan Vol. 8 Edisi III, Oktober – Desember 2021.

Kadek Intan Rahayu, dkk, 2019. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Penangkapan ikan ilegal) Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia.* Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019).

Muhammad Sofwan, 2014. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Penangkapan ikan ilegal (Studi Kasus Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 2012).* Jurusan Ilmu Pemerintahan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau

Muhammad Karim, *Problem Ekonomi-Politik Kemiskinan Nelayan,* Tersedia pada : Sinar Harapan (Diakses 15 September 2021).

Moch. Iqbal, 2012. *Penegakan Hukum Pidana “Penangkapan ikan ilegal” (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktek Penerapannya)* Puslitbang Hukum dan Peradilan. Badan Litbang Kementerian Hukum Mahkamah Agung RI.

Rico Coco Tombokan, 2021. *Prosdur Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penangkapan ikan ilegal Di Perairan Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.* Jurnal Lex Crimen Vol. X. 4/Ap/EK/2021.

Rokhman Nur, 2022. *Sanksi Bagi Plaku Penangkapan ikan ilegal Perspektif Undang-Undang Perikanan dan Hukum Islam.* Tesis. UIN Sunan Kalihaja Yogyakarta.

Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Adminitrasi Negara,* Glora Madani Press, Jakarta, hlm. 127

Sondang, siagian, 2003, *Filsafat Administrasi Edisi Revisi.* Jakarta, Bumi sara.



alizah, dkk, 2021. *Karakteristik Daerah Penangkapan Ikan Pada erasi Rawai Dasar di Perairan Pangkep Sulawesi Selatan.* iversitas Hasanuddin.

Wandi Haposan Sinurat, 2019. Tindak Pidana Penangkapan ikan ilegal Dengan Bahan Kimia di Perairan Belawan (Studi pada Ditpolairud Polda Sumatera Utara). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Wan Devri Agusti, 2021. Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan Dalam Pemberantasan Kegiatan Ilegal Fishing di Kelurahan Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Skripsi Universitas Islam Riau.

Skripsi

Crista Bella Citra, 2023. *Pengawasan Dinas Ketanagakerjaan Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Tahun 2021 Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.

Elifira Lamria Agnes Pasaribu, 2020. *Evaluasi Kebijakan Penanganan Penangkapan ikan ilegal (Studi Kasus Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Riau)*. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putra Batam Tahun 2020.

Muhammad Adha Ghifari, 2023. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan ikan ilegal Di Wilayah Hukum Polda Banten dan Dampaknya Terhadap Kerusakan Eksositem Laut*. Prodi Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung Indonesia. Bandung Conference Series.

Internet

Badan pusat statistik Kabupaten Pangkep, 2020. *Pangkep*. <https://pangkepkab.bps.co.id>, diakses pada 15 Januari 2024 Pukul 21:05 WITA

<https://Kompas.co.id>, 2022. *Upaya Pemerintah Mengatasi Penangkapan Ikan Secara Ilegal*, diakses pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 20:00 WITA.

[https://Nelayan Sulawesi Selatan Tangkap Ikan Ilegal.co.id](https://Nelayan_Sulawesi_Selatan_Tangkap_Ikan_Ilegal.co.id), diakses pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 22:00 WITA.



republiik.co.id, 2015, diakses pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 22:00 WITA.

[sulawesi. Viva news.co.id](https://sulawesi.viva_news.co.id) 2023. Diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 22:15 WITA.

Teropong Kota Makassar. <https://www.instagramco.id> teropongmakassar.
Tanggal 18 Februari 2024.

<https://Kabarmakassarco.id>, 2021. *Produksi Ikan Pangkep*

<https://Kabarmakassarco.id>, 2021. *Produksi Ikan Pangkep Tertinggi di Sulawesi Selatan*

<https://rokhmindahuri.info/2012/10/04/co.id> Selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/, diakses tanggal 25 Januari 2024.

<https://Kompas.com News/Nasional.co.id>, 2022. *Upaya Pemerintah Mengatasi Penangkapan ikan ilegal.*

<https://Nelayan Sulawesi Selatan.co.id> Sulawesi Selatan Tangkap Ikan Ilegal. Sindonews.com. Beyond Headlines, Muhammad Subhan. Diakses pada Tanggal 4 November 2020

Kabarmakassar.com, *Produksi Ikan Pangkep Tertinggi di Sulawesi Selatan.* Diakses pada tanggal 7 april 2021

Kompas.com/ News/Nasional. *Upaya Pemerintah Mengatasi Penangkapan ikan ilegal.* <https://t.me/kompascomupdate>. Diakses pada tanggal 29 april 2022

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 115 Tahun 2015 tentang Tugaskas Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Penangkapan ikan ilegal).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing).

Permen Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bupati Pangkep Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pangkep.





Optimized using
trial version
www.balesio.com